

## **TELAAH DOKTRIN BUSH DAN OBAMA DALAM KONTEKS STUDI AMERIKA DAN DUNIA**

### **Abstraksi**

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa ataupun menelaah perbandingan antara Doktrin Bush dan Doktrin Obama dalam konteks studi Amerika dan Dunia. Dalam melakukan analisa tulisan ini, penulis menggunakan metode kualitatif.

Dalam tulisan ini penulis menemukan analisa bahwasanya terdapat perbedaan dan juga persamaan antara doktrin Bush dan doktrin yang akan diumumkan Obama. Perbedaan kedua doktrin tersebut terletak pada redaksional dan pemilihan kata. Selain itu perbedaan faktor ideosinkretik menjadi latarbelakang perbedaan itu. Kendati demikian, antara kedua doktrin tersebut terdapat persamaan yang esensial, yakni tetap menjaga dan mengedepankan kepentingan nasional Amerika terutama dalam bidang keamanan. Keamanan mutlak perlu dijaga agar kepentingan nasional bidang yang lain tidak terganggu. Selain itu persamaan antara kedua doktrin itu adalah tetap dalam konteks menjaga dan melestarikan status hegemoni yang dimiliki Amerika saat ini.

Oleh karena itu, antara doktrin Bush dan doktrin Obama terdapat perbedaan dan juga persamaan.

Kata kunci: *Preemptive military strikes doctrine* (Doktrin Bush), hegemoni, dan kepentingan nasional

### **A. PENDAHULUAN**

Perjalanan sejarah telah mencatat, pasca berakhirnya Perang Dingin Amerika tampil sebagai negara penguasa dunia. Bipolaritas dalam bentuk *power* yang mempengaruhi hubungan antar negara di dunia kala itu berganti menjadi multipolar yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet. Namun tidak lama waktu berselang, kutub dunia yang multipolar seolah berekonstruksi membentuk kekuasaan dunia yang unipolar. Dalam unipolaritas kekuasaan dunia itu, Amerika tampil sebagai pemimpin utamanya. Oleh karena itu sangat beralasan jika Amerika dikatakan sebagai negara *super power* pemegang puncak hegemoni dunia.

Perolehan status Amerika sebagai "pemimpin" dunia tentunya tidak terlepas dari berbagai strategi yang dibangun dan dilaksanakan oleh segenap aparatur pelaksana negara baik dalam skala nasional maupun internasional. Namun terlepas dari dukungan segenap *stake holders* tersebut, Presiden tetaplah memegang peranan yang sangat besar. Presiden dapat disebut sebagai wahana sekaligus pelaksana yang menjalankan kebijakan negara untuk mencapai tujuan-tujuan negara berdasarkan prinsip-prinsip negara yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugasnya selalu terlihat kombinasi antara perannya sebagai pemimpin yang menjaga kepentingan

negara dengan faktor-faktor ideosinkretik yang ada dalam dirinya. Inilah barangkali yang menjadikan setiap presiden Amerika memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda, walaupun dengan tujuan yang relatif sama.

Dalam dekade terakhir ini, Amerika dipimpin oleh dua presiden yang memiliki perbedaan yang relatif signifikan. Namun yang pasti antara George Walker Bush dan Barrack Obama memiliki kepentingan yang sama, yakni mencapai segenap kepentingan nasional Amerika serta menjaga status kepemimpinan Amerika di dunia. Adalah lazim jika perbedaan latar belakang menjadikan kedua presiden itu memiliki gaya kepemimpinan dan kebijakan yang berbeda baik dalam kapasitas nasional maupun internasional.

Untuk menjaga kepentingan nasionalnya sekaligus mempertahankan posisinya sebagai pemimpin dunia, pada masa kepemimpinannya Bush pernah mengumandangkan "Doktrin Bush". Setelah peristiwa 11 September 2001, dihadapan kongres Amerika Serikat tanggal 20 September 2001, Bush mengeluarkan ancaman kepada dunia internasional, "*Either you with us or you are with the terrorist*". Bush juga mengatakan, "*If you are not with us, you are against us*". Pernyataan yang lebih dikenal dengan Doktrin Bush ini jelas-jelas memaksa negara-negara lain di dunia menentukan sikap dan seolah telah membagi bumi menjadi dua belahan, yakni teroris dan bukan teroris.<sup>1</sup> Doktrin inilah yang seakan melegitimasi serangan Amerika Serikat ke Afghanistan dengan alasan untuk menumpas terorisme.

Walaupun cukup menuai kontroversi, namun tidak lama waktu berselang, tepatnya pada tahun 2002, Bush mengumumkan doktrin *preemption* dalam pidatonya di hadapan lulusan Akademi Militer West Point. Doktrin yang juga dikenal dengan istilah *Preemptive Military Strikes Doctrine* ini adalah kebijakan yang merupakan bagian dari strategi keamanan Amerika Serikat dalam upaya menjaga kepentingan nasionalnya.<sup>2</sup> Dapat dikatakan bahwa doktrin inilah yang membuka jalan menuju invasi Amerika ke Irak tahun 2003.

Pada masa pemeritahan Barrack Obama sekarang, kebijakan itu kini sedang ditinjau ulang. Jika Pentagon menganggapnya tidak lagi sesuai dengan situasi saat ini maka kebijakan itu akan dicabut dalam *Quadrennial Defense Review* (peninjauan

---

<sup>1</sup> Micahel Byers, "Terrorism: The Use of Force and International Law After 11 September", dalam *International Relations Journal*, Vol. 6. No. 2, New York: Prentice Hall Inc., hlm. 155.

<sup>2</sup> G. Jonh Ikenberry, "America's Imperial Ambitions" dalam *American Foreign Policy Theoretical Essay*, Edisi ke-4, (New York: W.W. Norton dan Compagny, Inc., 2007), hlm. 575.

pertahanan tiap empat tahun) mendatang.<sup>3</sup> Setelah setahun kepemimpinannya, Obama diindikasikan juga akan mengeluarkan "Doktrin Obama". Jika terjadi persegeran esensi maupun perubahan pada doktrin tersebut, tentunya disebabkan oleh berbagai faktor. Sebagai analisa awal yang awam, pergeseran esensi Doktrin Bush dalam Doktrin Obama dapat disebabkan oleh adanya perbedaan faktor situasi internasional sesaat setelah terjadinya peristiwa 11 September dengan pada masa pemerintahan Obama saat ini. Selain itu dapat ditengarai pula perbedaan itu disebabkan oleh faktor perbedaan latar belakang individu diantara kedua presiden Amerika tersebut.

Tulisan ini akan membahas mengenai perbandingan doktrin yang dikeluarkan oleh kedua pemimpin tersebut dalam kebijakan dan politik luar negeri terkait hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai objek pembahasan dalam konteks Amerika dan Dunia. Analisa mengenai bagaimana persamaan dan atau perbedaan doktrin yang dikeluarkan oleh kedua presiden Amerika ini, merupakan tujuan utama dari tulisan ini.

## **B. AMERIKA: NEGARA HEGEMONI PENGUASA DUNIA**

Semenjak berakhirnya Perang Dingin bahkan hingga sekarang, belum ada yang memungkiri status Amerika sebagai pemimpin dunia saat ini. Beberapa istilah melekat erat ketika membicarakan tentang keunggulan Amerika. Mulai dari adidaya, adikuasa, *super power*, *great power*, *central power*, hegemoni, serta beberapa istilah lainnya yang menunjukkan betapa hebatnya Amerika kini dalam percaturan dunia. Terlepas dari adanya kontroversi dari kelompok pesimis yang pada intinya menelaah persoalan ini dari masalah waktu – sampai kapan hegemoni Amerika ini akan berlangsung – namun realita menunjukkan bahwa eksistensi Amerika dengan berbagai predikat di atas, masih berlangsung hingga saat ini.

Lebih dari satu dekade yang lalu, kolumnis politik Charles Krauthammer menyatakan dalam tulisannya kehadiran sesuatu yang disebutnya "*moment unipolar*", sebuah periode di mana ada suatu negara adidaya, Amerika Serikat, yang jelas-jelas berdiri di atas seluruh komunitas internasional. Tahun-tahun berikutnya Uni Soviet runtuh, ekonomi dan militer Rusia merosot tajam, dan Jepang mandek, sementara

---

<sup>3</sup> Redaksi, "Departemen Perdagangan AS Kini Sedang Meninjau Ulang Doktrin *Preemptive Military Strikes*", diperoleh dari [www.suaramedia.com](http://www.suaramedia.com) ; Internet, diakses tanggal 1 April 2010.

Amerika Serikat mengalami perluasan ekonomi yang terlama dan merupakan salah satu yang terkuat sepanjang sejarah.<sup>4</sup>

*Great power*, sebagai salah satu terminologi yang melekat untuk mengemukakan kapasitas Amerika dalam menguasai dunia saat ini dapat didefinisikan sebagai negara yang memberi kesan dan memiliki pengaruh yang paling kuat dalam sistem internasional pada suatu waktu. Dalam beberapa abad terakhir ini, setidaknya terdapat beberapa negara yang tergolong dalam kategori *great power*. Namun dalam masa akhir-akhir ini Amerika tampil sebagai *great power* utama. Amerika merupakan negara yang mendominasi dunia, paling tidak melalui berbagai kebijakannya yang pasca Perang Dingin menjadi referensi utama dalam pembuatan kebijakan luar negeri negara-negara lain di dunia.<sup>5</sup>

*Super power* juga merupakan salah satu terminologi yang bermaksud untuk mengemukakan keutamaan penampilan Amerika dalam percaturan global. Tidak jauh berbeda dengan *great power*, negara *super power* adalah negara yang memainkan aturan kepemimpinan yang krusial dalam sistem internasional dan dapat memperoleh kesetiaan dari negara-negara lain. Dengan kemampuan politik yang dimilikinya, negara *super power* memiliki kapabilitas untuk mengganggu negara lain yang lebih kecil yang bagi negara kecil tersebut serasa seolah sedang dihukum oleh negara *super power*. Saat ini, sejak keruntuhan Uni Soviet hingga sekarang, hanya ada satu *super power* – Amerika Serikat.<sup>6</sup>

Sebagai terminologi utama dari beberapa yang melekat pada identitas Amerika saat ini, hegemoni adalah terminologi yang paling komprehensif untuk menggambarkan kapasitas Amerika dalam sistem dunia saat ini. Dalam hubungan internasional, hegemoni dimaknai sebagai "*leadership*". Negara hegemon artinya negara yang menjadi pemimpin dari negara-negara lain yang ada di dunia. Status hegemoni tidak dapat muncul dengan sendirinya, melainkan melalui perjalanan fenomena politik *interstate system* yang terjadi di dunia. Hegemoni merupakan produk dari sejarah yang spesifik dan lingkungan politik. Hegemoni terdiri dan diperoleh dari kepemilikan dan penguasaan dalam beraneka kumpulan sumber-sumber *power*. Negara hegemoni memiliki kemampuan untuk memerintahkan negara-negara lain

---

<sup>4</sup> Stephen G. Brooks dan William C. Wohlforth, "Keunggulan Amerika dalam Tinjauan", dalam *Amerika dan Dunia, Memperdebatkan Bentuk Baru dalam Politik Internasional*, (Jakarta: Freedom Institute dan Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 267.

<sup>5</sup> Marin Griffiths dan Terry O'Callaghan, *International Relations: The Key Concepts*, (London: Routledge, 2002), hlm. 132-133.

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 304.

agar sejalan dengan keinginan dan kepentingan nasionalnya, mengatur dan menjalankan aturan main dalam relasi dan inter-relasinya dengan negara-negara lain di dunia.<sup>7</sup>

Dari beberapa penjelasan konseptual di atas, tidaklah berlebihan jika Amerika dikatakan sebagai negara hegemoni yang menjadi pemimpin bagi negara lain di dunia, setidaknya sejak berakhirnya Perang Dingin hingga saat ini. Amerika memiliki pengaruh dan dominasi yang cukup kuat dalam berbagai bidang vital penyelenggaraan negara. Dari segi ekonomi, Amerika merupakan negara yang makmur dan sejahtera yang diperoleh melalui kematangan dan perjalanan sejarah yang cukup panjang dan penuh tempaan. Dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi, Amerika selalu menjadi pioner dalam berbagai kemajuan, pengembangan dan penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir dunia. Demikian juga halnya dengan perkembangan industri. Industrialisasi Amerika merupakan penggerak dan menjadi mode bagi industrialisasi negara-negara lain. Dalam sisi politik, kepiawaian strategi Amerika tidak diragukan lagi. Dari aspek keamanan, meskipun mengalami preseden buruk yang mengindikasikan sisi lemah pertahanan dan keamanan Amerika Serikat, namun tetap masih diakui keunggulannya. Dengan berbagai realita dan perolehan-perolehan semacam ini, dalam konteks Amerika dan Dunia sangat beralasan jika mengungkapkan bahwa Amerika adalah negara hegemoni sebagai penguasa dunia.

Tidaklah mudah untuk meraih status sebagai negara hegemoni ini. Amerika membutuhkan perjalanan panjang dengan segenap perjuangan dan pengorbanan. Oleh karenanya wajar saja jika setiap presiden yang memimpin Amerika berkeinginan keras untuk menjaga dan melestarikan status hegemoni tersebut demi mempertahankan eksistensi keunggulan negaranya. Meskipun modus dalam mempertahankan eksistensi ini berbeda oleh setiap presiden, namun mereka tetap melaksanakan dengan tujuan yang sama – mempertahankan hegemoni Amerika.

### **C. HEGEMONI UNTUK KEPENTINGAN NASIONAL**

Secara fundamental dapat ditelaah bahwasanya setiap tindakan yang dilakukan oleh negara baik dalam skala internal maupun eksternal dilakukan dengan tujuan yang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengejar, memperoleh, dan mempertahankan kepentingan nasional sesuai dengan tujuan dan cita-cita negara. Kepentingan nasional

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 137-138.

tidak dapat diperoleh hanya dengan mengandalkan sumberdaya-sumberdaya internal. Diperlukan kombinasi dan sinergi yang kuat diantara berbagai sumberdaya internal dan eksternal negara.

Status hegemoni yang telah diraih Amerika saat ini memberikan sumbangsih yang sangat signifikan dan esensial bagi kepentingan nasional Amerika. Dengan hegemoni yang diraihnya, Amerika dapat melanggengkan kekuasaannya dalam percaturan global. Hegemoni yang melekat pada identitas Amerika saat ini akan memberikan kemudahan bagi upaya pelestarian eksistensi bidang-bidang vital penyelenggaraan negara seperti ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, bahkan ideologinya agar tetap berada pada lini terdepan di dunia.

Dari telaah tentang Amerika sebagai negara hegemoni penguasa dunia dan hegemoni untuk kepentingan nasional di atas, dapat dikatakan bahwa antara hegemoni dan kepentingan nasional terdapat sinergi yang teramat kuat. Dengan hegemoni yang diraihnya, dapat menjadi jalan utama Amerika untuk mencapai dan mempertahankan kepentingan nasional. Sedangkan hegemoni yang diraih Amerika adalah sumbangan yang sangat berarti terhadap kepentingan nasional.

Untuk memperoleh status hegemoni yang memberikan sumbangsih sangat besar terhadap aspek-aspek kepentingan nasional tersebut, secara eksternal diperoleh melalui politik dan atau kebijakan luar negeri. Politik luar negeri diperlukan sebagai strategi untuk mengatur hubungan dengan negara lain demi kepentingan internal.

Politik luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional. Politik luar negeri yang spesifik dilaksanakan oleh suatu negara sebagai sebuah inisiatif atau sebagai sebuah reaksi atas inisiatif yang dilakukan oleh negara lain. Politik luar negeri mencakup proses dinamis dari penerapan pelaksanaan kepentingan nasional yang relatif terhadap faktor situasional yang sangat fluktuatif di lingkungan internasional dengan maksud untuk mengembangkan suatu cara tindakan sesuai dengan panduan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.<sup>8</sup>

Secara teoritis pada konteks politik luar negeri Amerika dalam menjalin hubungan dengan negara lain di dunia untuk mencapai kepentingan nasional (Amerika dan Dunia), terdapat empat *framework* utama. Empat *framework* itu

---

<sup>8</sup> Jack C. Plano dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional*, (Jakarta: Putra A. Bardin, 1999), hlm. 5.

singkatnya dikenal sebagai kerangka kerja politik luar negeri Amerika untuk mencapai kepentingan nasional, yang terdiri dari *power, peace, prosperity, dan principles* (4 P).<sup>9</sup>

Berikut akan dijelaskan mengenai *frame work* kepentingan nasional Amerika untuk menguasai dunia:<sup>10</sup>

### **Power (kekuasaan)**

*Power* adalah syarat kunci dalam merumuskan dasar tujuan Amerika menguasai dunia, pertahanan diri, dan pemeliharaan kemerdekaan dan teritorial nasional. *Power* mutlak diperlukan untuk menegah terjadinya agresi dan penting untuk menyebarkan pengaruh terhadap negara lain. *Power* merupakan kunci utama untuk memelihara pertahanan yang kuat dan pencegahan yang kredibel. *Power* memungkinkan aktor untuk membentuk sesuai dengan refleksi kepentingannya. *Power* juga memungkinkan Amerika untuk memelihara keamanan, menangkis dan menaklukkan setiap ancaman terhadap keamanan negara. *Power* bisa mendesak justifikasi penggunaan kekuatan militer. Dalam konteks *power*, Amerika masih menggunakan pendekatan pandangan-pandangan realis.

Sebagai konsekuensi dari hal ini, terdapat empat poin utama:

1. Negara mengejar kepentingan-kepentingan, tidak untuk perdamaian.

Konteks inilah yang membangun perilaku Amerika dalam menjalankan politik luar negerinya. Amerika tidak segan untuk mengumandangkan perang dengan pihak lain jika merasa kepentingannya terganggu. Amerika lebih memilih untuk melakukan tindakan agresi, perang, dan tindakan koersif semacamnya dengan alasan dan seruan untuk menciptakan perdamaian.

2. Politik dan kekuasaan militer adalah hal utama yang harus diedarkan.

Bagi Amerika, usaha untuk mempertahankan keamanan lebih penting dari pada hanya sekedar upaya pemeliharaan keamanan. Artinya Amerika lebih cenderung menggunakan strategi-strategi yang defensif ketimbang deteren.

3. Kekuasaan ekonomi dan aspek-aspek kemakmuran lainnya menjadi nilai penting bagi kekuasaan militer.

Ekonomi Amerika telah membuat dan menjadikan Amerika kuat sebagai pesaing utama dalam kancah global. Hal itu karena didukung oleh berbagai penemuan

---

<sup>9</sup> G. Jonh Ikenberry, *American Foreign Policy Theoretical Essay*, Edisi ke-4, (New York: W.W. Norton dan Compagny, Inc., 2007), hlm. 8.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm 9-15.

dan inovasi teknologi. Keadaan itu telah membuat Amerika menjadi aktor utama dalam penguasaan teknologi mutakhir dunia. Selain itu untuk menjaga kondisi demikian, diperlukan dukungan yang penuh dari aspek politik, dimana sebagai bentuk komitmennya alokasi dana pertahanan di Amerika adalah yang terbesar di dunia.

4. Meskipun prinsip-prinsip seperti demokrasi dan hak asasi adalah penting, namun tetap harus mendukung penuh eksistensi *power*.

### ***Peace (Perdamaian)***

*Peace* secara filosofis dilihat sebagai tujuan dalam menjawab pertanyaan untuk apa *power* diamankan. Secara prinsip, Amerika memposisikan diri sebagai penjaga keamanan dunia. Hal ini dilatarbelakangi oleh perjalanan sejarah dan prinsip-prinsip dasar yang dipegang teguh oleh bangsa Amerika. Untuk mewujudkan *peace*, Amerika tidak segan-segan untuk mengumandangkan perang. Dalam politik luar negeri Amerika, ini lebih dikenal dengan istilah “perang untuk mengakhiri perang”.

### ***Prosperity (Kemakmuran)***

Politik luar negeri Amerika, utamanya dimotifasi oleh keinginan untuk mencapai dan mempertahankan kemakmuran. Dalam motifasi ini, terdapat beberapa kepentingan ekonomi dalam politik luar negeri Amerika, diantaranya:

- Kebijakan-kebijakan untuk membantu menurunkan tarif impor dalam hubungan dagangnya dengan negara lain.
- Menciptakan pertumbuhan pasar untuk produk-produk ekspor Amerika.
- Penanaman investasi luar negeri yang menguntungkan bagi Amerika.
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik, dan lain-lain.

Banyak teori yang menekankan bahwa penekanan utama politik luar negeri Amerika adalah faktor-faktor ekonomi. Secara umum, penekanan ekonomi dalam politik luar negeri Amerika dibagi dalam dua prinsip. Pertama, politik luar negeri Amerika ditekankan untuk mencapai keuntungan ekonomi bagi Amerika. Indikatornya adalah keseimbangan perdagangan, pertumbuhan ekonomi, dan kondisi makroekonomi yang sehat. Untuk mencapai tujuan ini, dalam memasuki abad ke-21 politik luar negeri Amerika menekankan efektifitas lembaga-lembaga internasional yang dirancangnya untuk meningkatkan keuntungan ekonominya (*International Monetary Found, World Trade Organization, dan World Bank*). Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa eksistensi dari ketiga lembaga ini adalah dalam rangka untuk menjalankan politik luar Amerika untuk mencapai *prosperity*.

Kedua, politik global Amerika dalam kerangka *prosperity* banyak didominasi oleh kelompok kapitalis dan elit-elit yang lain seperti *Multinational Corporations* dan bank-bank besar yang bekerja dalam ruang lingkup global. Prinsip yang kedua ini, singkat kata dapat dikatakan sebagai politik kolonialisasi dan imperialisasi gaya baru terhadap negara-negara lain.

### ***Principles (Prinsip)***

Inti tujuan politik luar negeri Amerika yang keempat adalah prinsip. Prinsip itu meliputi nilai, idealisme, dan kepercayaan. Untuk prinsip ini, politik luar negeri Amerika utamanya untuk menyebarkan akar-akar idealisme demokrasi-nya ke seluruh dunia. Oleh para pemikir Amerika yang melahirkan demokrasi seperti Thomas Jefferson, ... hanya bentuk pemerintahan republik yang demokratis yang menghargai hak asasi manusia... berarti demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang perlu dijaga dan dikembangkan di dunia. Dalam konteks ini, tindakan politik luar negeri Amerika tidak dapat dilepaskan dari upaya penyebarluasan prinsip-prinsip negaranya ke seluruh dunia.<sup>11</sup>

Keempat prinsip dalam tataran teoritis inilah yang menjadi landasan bagi para pemimpin Amerika dalam menjalankan politik luar negeri dan menjalin hubungan internasional dengan negara-negara lain di dunia. Meskipun kebijakan yang diambil masing-masing presiden dikemas dengan tampilan yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya politik maupun kebijakan luar negeri yang diterapkan tetap akan bersandar dan tidak terlepas dari keempat prinsip di atas.

## **D. DOKTRIN PEMIMPIN NEGARA UNTUK MENYELAMATKAN KEPENTINGAN NASIONAL**

Dalam mengatur dan menjalankan politik luar negeri sebagai upaya untuk menguasai dunia demi mencapai tujuan nasional, presiden memiliki wewenang dan tanggung jawab paling besar. Presiden memiliki hak untuk mengambil segenap tindakan dengan tujuan untuk menjaga kepentingan negara. Dengan penjelasan dua poin sebelumnya, dapat dilakukan pemaknaan ataupun telaah mengenai doktrin yang dikeluarkan oleh persiden Amerika Serikat dalam konteks politik luar negeri terhadap lingkungan eksternalnya demi menjaga kepentingan internal Amerika.

---

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm 9-15.

Pada masa kepemimpinan presiden George Wolker Bush, terjadi peristiwa serangan 11 September 2001 yang merupakan "tamparan" keras terhadap sistem pertahanan dan keamanan Amerika Serikat. Tragedi 11 September itu seolah membangunkan Amerika yang semenjak berakhirnya Perang Dingin lebih berkonsentrasi terhadap politik luar negeri yang menggunakan *soft-power*.<sup>12</sup> Serangan teroris yang menghancurkan *World Trade Centre* dan merusak Pentagon telah memicu perubahan paling cepat dan dramatis dalam sejarah kebijakan luar negeri Amerika.<sup>13</sup> Dalam situasi perubahan yang teramat cepat itulah presiden Bush mengeluarkan Doktrin Bush. Doktrin Bush itu pula yang seolah melegalkan operasi militer di Afghanistan untuk tujuan menjaga kepentingan keamanan Amerika.

Setahun berikutnya, dalam pidatonya di hadapan lulusan Akademi Militer West Point tahun 2002, Bush mengumumkan doktrin *preemption*. *Preemptive military strikes doctrine* merupakan kebijakan yang memungkinkan Amerika untuk menyerang negara-negara yang diyakininya akan menghadirkan ancaman di masa depan. Doktrin ini pula lah yang membuka jalan menuju invasi Irak tahun 2003.<sup>14</sup>

Dalam doktrin *preemption* Bush menegaskan bahwa perang yang sulit diramalkan yang dilakukan Amerika di Afghanistan adalah demi kekuatan Amerika dan kebebasan, sebuah perdamaian yang adil, dan sebuah perdamaian yang memihak pada kebebasan. Perang yang dilakukan adalah untuk melawan teroris dan tiran. Dalam doktrin ini, Bush mengingatkan pemerintah dan rakyat Amerika agar selalu berjaga dan siap terhadap ancaman dan rencana lain dari teroris. Bush menuduh tentang adanya senjata biologis pemusnah masal yang dapat menghancurkan dan merusak Amerika, dan oleh karena itu Amerika harus melawan dengan segala kekuatan yang mereka miliki. Menurut Bush dalam doktrinnya, menggempur musuh dan merusak rencananya adalah tindakan yang harus dilakukan Amerika untuk menghindari ancaman yang lebih parah terhadap keamanan Amerika. Bush

---

<sup>12</sup> Joseph S. Nye, Jr. "Beyond Septemeber 11", dalam *The Domestic Source of American Foreign Policy*, Eugene R. Wittkopf dan James M. McCormick ed., (New York: Rowman and Littlefield Publisher Inc., 2004), hlm. 1.

<sup>13</sup> Stephen M. Walt, "Beyond Bin Laden: Reshaping U.S. Foreign Policy" dalam *America and the World, Debating the New Shape of International Politics*, (New York: Council and Foreign Relations Inc., 2002), hlm. 320.

<sup>14</sup> Redaksi, "Departemen Perdagangan AS Kini Sedang Meninjau Ulang Doktrin *Preemptive Military Strikes*", diperoleh dari [www.suaramedia.com](http://www.suaramedia.com) ; Internet, diakses tanggal 1 April 2010.

menekankan keharusan semua warga Amerika untuk berpandangan ke depan dan bersikap tegas, dan siap dengan tindakan *preemptif* (mendahului musuh).<sup>15</sup>

*Preemption* berarti melakukan serangan pertama terhadap negara lain yang tampak sedang mempersiapkan serangan atau telah dalam proses melakukan serangan. Itu adalah sebuah pembelaan diri dan setiap bangsa memiliki hak untuk melakukannya. Namun, pendukung perang *preventif* berdalih bahwa perang itu dilakukan untuk menyerang secara strategis negara lain yang mungkin, suatu hari nanti, akan menghadirkan sebuah ancaman militer. Dengan demikian, perang *preventif* tidak dapat dibedakan dengan perang agresi, sebuah pelanggaran terhadap hukum internasional yang paling mendasar dan mengesampingkan persoalan moral, dari sudut pandang utilitarian keras.<sup>16</sup>

Meskipun terdapat kontroversi atas penggunaan doktrin tersebut, namun akibat dari pelaksanaan doktrin itu sudah dirasakan dunia internasional. Terlepas dari segenap hal-hal yang melatarbelakngi berbagai perbedaan persepsi atas doktrin itu, namun dalam konteks Amerika dan Dunia, doktrin *preemptif* Bush tersebut yang pasti ditempuh dalam rangka menjaga kepentingan nasional Amerika.

Pergantian kepemimpinan Amerika membuat penggunaan doktrin Bush itu perlu dikaji kembali. Selain itu Kongres Amerika juga menuntut pemerintah agar melaporkan strategi keamanan nasional setiap tahunnya. Untuk itu, Pentagon di bawah presiden Obama pun perlu menilai kembali kebijakan-kebijakan dan berbagai doktrin perang yang harus dikaji setiap empat tahun. Menurut Kahleen Hicks, *deputy undersecretary* Pertahanan dan Keamanan Amerika Serikat mengatakan bahwa kebijakan perang dan doktrin pada masa Bush kini sedang ditinjau ulang dan jika Pentagon menganggapnya tidak lagi sesuai dengan situasi saat ini maka kebijakan itu akan dicabut *dalam Quadrennial Defense Review* (peninjauan pertahanan tiap empat tahun) mendatang.<sup>17</sup>

Meskipun administrasi Obama belum membeberkan doktrin keamanannya dihadapan Kongres, namun berbagai indikasi seputar doktrin Obama telah

---

<sup>15</sup> George W. Bush, "Pidato Sambutan West Point" dalam dalam *Amerika dan Dunia, Memperdebatkan Bentuk Baru dalam Politik Internasional*, (Jakarta: Freedom Institute dan Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm.423-432.

<sup>16</sup> Redaksi, "Departemen Perdagangan AS Kini Sedang Meninjau Ulang Doktrin *Preemptive Military Strikes*".

<sup>17</sup> Althaf, "Akankah Obama Mengubah Doktrin Perang Bush? Diperoleh dari <http://www.arrahmah.com/index.php/news/read/5884/akankah-obama-mengubah-doktrin-perang-bush>; Internet, diakses tanggal 1 April 2008.

diperkirakan dan dipelajari oleh berbagai pihak. Dari dalam Gedung Putih dan Pentagon sendiri, telah terlihat indikasi bahwa Obama ingin memperbarui doktrin penggunaan kekerasan itu dan akan mulai mempertanggungjawabkannya. Meskipun berbagai pengamat juga mengindikasikan bahwa Obama mungkin akan mempertahankan doktrin warisan Bush ini untuk melancarkan agenda perang melawan terorisme di masa depan, namun penggunaannya akan dipersempit dengan gaya yang lebih populis untuk mengahkiri pandangan dan pencitraan negatif tentang hak asasi manusia dan kemanusiaan yang terjadi akibat pelaksanaan doktrin Bush tersebut.<sup>18</sup>

Hingga saat ini meskipun pemerintahan Barrack Husein Obama sebagai presiden Amerika Serikat yang ke-44 tengah berjalan, belum terdengar pernyataan penting dari Obama menyangkut akibat dari pelaksanaan doktrin Bush itu, kecuali rasa prihatin dan tidak lebih dari itu. Akankah doktrin Obama yang membawa perdamaian abadi di Timur Tengah, atau bisakah Obama mengendalikan Israel? Memang harus menunggu waktu untuk menjawab pertanyaan itu. Meskipun nampaknya belum terlihat "cahaya diujung terowongan", namun banyak pihak yang berharap Obama dapat melakukan perubahan penting.<sup>19</sup>

Apapun kebijakan luar negeri melalui doktrin yang akan diumumkan Obama, namun sebagian besar rakyat Amerika dan dunia tengah menanti dengan penuh harapan. Sebagian besar dari mereka menginginkan munculnya sebetulnya *fairness doctrine* dalam pemerintahan Obama. Bagaimanapun dalam lingkungan masyarakat Amerika banyak masyarakat yang memandang negatif kebijakan luar negeri yang ditempuh melalui doktrin Bush. Mereka juga berharap Obama dapat mengembalikan situasi *fairness* seperti masa Bill Clinton dahulu meskipun terdapat berbagai kekurangan dan kelebihan dalam administrasi Clinton.<sup>20</sup>

Setidaknya terdapat beberapa alternatif strategi yang akan digunakan Obama seperti yang diindikasikan oleh pejabat-pejabat Gedung Putih dan Pentagon. Pertama, administrasi Obama akan bersifat *strong* dengan tetap pada komitmen untuk memberantas terorisme di dunia, terlepas dari adanya *soft diplomasi* dan perbedaan redaksional dengan doktrin Bush. Kedua, mengedepankan efektifitas diplomasi untuk

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Denny Darjaman, "Patung Obama dan Sebuah Harapan" diperoleh dari <http://darjaman.wordpress.com/2010/01/04/patung-barack-husein-obama-dan-sebuah-harapan/> ; Internet, diakses tanggal 1 April 2010.

<sup>20</sup> Dennis Loo, "Obama and the Fairness Doctrin", *New York Times*, 19 Februari 2009.

memperoleh keamanan Amerika dan otoritas penggunaan tekanan. Ketiga, menganalisa dan mengukur sebab dan akibat terjadinya terorisme. Keempat, memprekenalkan kontrol global tanpa penggunaan nuklir dan material lain yang digunakan oleh para militer. Kelima, memperkuat kontrol yudisial nasional dan internasional yang berhubungan dengan lintas negara.<sup>21</sup>

#### **E. TELAAH DOKTRIN BUSH DAN OBAMA**

Doktrin yang dikeluarkan Bush dalam menghadapi kelompok yang disebutnya teroris dan kaum tiran tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor ideosikritik yang melatarbelakanginya. Faktor-faktor itu dapat berupa aliran pemikiran, latar belakang pendidikan, keluarga, pergaulan, dan aspek-aspek lain yang berkenaan dengan individu Bush sebagai presiden. Faktor-faktor inilah yang dikombinasikan dengan prinsip-prinsip, pemikiran, dan pandangan hidup yang dianut Amerika secara umum. Demikian pula halnya dengan Obama.

Bagi Bush, lingkungan keluarga militer dimana Bush dibesarkan, turut berpengaruh dalam membentuk karakternya sebagai individu. Bush terbentuk menjadi pribadi yang disiplin dan penuh tanggung jawab. Namun disiplin dan tanggung jawab tersebut berada dalam karakter yang keras, sehingga orang-orang dekat Bush cenderung relatif mengatakan Bush sebagai watak yang berpendirian keras. Dalam masalah ekonomi, Bush memiliki kapabilitas bisnis yang relatif sangat baik dan sudah terdidik secara manajerial karena dia terjun langsung dalam bisnis minyak keluarganya. Walaupun dibesarkan dalam keluarga yang mapan, namun Bush tidak mau tergantung pada fasilitas yang diberikan orang tuanya, dia cenderung mandiri. Inilah yang membuat Bush banyak diterpa oleh pengalaman-pengalaman kehidupan. Meskipun sebagai sosok yang keras, Bush sangat sensitif ketika mengenang kematian kakaknya. Inilah yang mengindikasikan Bush sebagai sosok yang emosional.<sup>22</sup>

Dalam segi politik, Bush termasuk dalam kelompok konservatif dan memilih partai Republik sebagai wahana penyalur insting politik dan kepemimpinannya. Bush adalah termasuk dalam kubu *hawkish*, yakni penganut kebijakan garis keras terhadap

---

<sup>21</sup> Tai-Heng Cheng dan Edward Valaitis, "Shaping an Obama Doctrine of Preemptive Force" *Temple Law Review*, Fall, 2009, hlm. 4.

<sup>22</sup> Fred I. Greenstein, "The Changing Leadership of George W. Bush", dalam *The Domestic Source of American Foreign Policy*, Eugene R. Wittkopf dan James M. McCormick ed., (New York: Rowman and Littlefield Publisher Inc., 2004), hlm. 353-356.

dunia Islam.<sup>23</sup> Setelah menjadi presiden Amerika pun, karakter-karakter pribadi Bush sedikit banyaknya memberi pengaruh signifikan dalam kebijakan-kebijakan yang ditempuhnya, baik dalam lingkungan domestik, terlebih lagi dalam lingkungan internasional. Termasuk dalam kebijakan intelijen, tidak sedikit kebijakan yang cenderung emosional yang memperlihatkan pengaruh emosional dan pemaksaan kehendak Bush.<sup>24</sup>

Dalam pandangan politik luar negeri, Bush memiliki pandangan yang paralel dengan Samuel P. Huntington, akademisi Harvard University dan penasihat kawakan Gedung Putih. Pandangan dan sikap yang ditempuh Bush terkait peristiwa 11 September juga banyak dipengaruhi Huntington. Bush dan Huntington yang sama-sama dari kubu *hawkish*, menganggap kejadian tersebut sebagai faktor signifikan bagi penguatan hegemoni Amerika yang dimanifestasikan dalam bentuk kehadiran dan peran global Amerika dalam pentas politik internasional secara lebih dominan.

Serangan teroris 11 September memperkuat keyakinan Bush dan Huntington bahwa kepentingan keamanan negara itu tidak dapat dilepaskan dari situasi keamanan global, yang pada gilirannya menuntut penguatan posisi hegemoni Amerika dan keterlibatan luas dalam percaturan politik internasional. Persepsi Bush paralel dengan Huntington, yang dalam bukunya (*Who Are We?: The Challenges to America's National Identity*, New York: Simon & Schuster, 2004) menyatakan musuh utama Barat pasca-Perang Dingin adalah "Islam militan", dan dari berbagai penjelasannya, definisi "Islam militan" melebar ke mana-mana, ke berbagai kelompok dan komunitas Islam, baik radikal maupun fundamental. Doktrin *preemptive strike* (serangan dini) dan *defensive intervention* (intervensi defensif) telah secara resmi diumumkan Bush tidak terlepas dari nasehat dan dukungan Huntington mendukung agar Amerika dan Barat melakukan *preemptive strike* terhadap kaum militan. Nasihat Huntington memang telah dijalankan Gedung Putih dengan menyerang Irak dan Afghanistan serta mengintervensi Palestina. Kekuatan Islam militan di berbagai belahan bumi pun menjadi target Amerika, dan yang disebut sebagai Islam militan bukan hanya Usamah bin Ladin atau kelompok Al-Qaidah, melainkan mencakup juga banyak kelompok lain yang bersikap negatif terhadap Amerika. Pandangan Huntington mempengaruhi Bush, terutama persepsi bahwa apa yang dulu dilakukan oleh komunis internasional juga

---

<sup>23</sup> Herdi Sahrasad, "USA, Huntington dan Indonesia", *Tempo*, 20 November 2006.

<sup>24</sup> Fred I. Greenstein, "The Changing Leadership of George W. Bush", dalam *The Domestic Source of American Foreign Policy*, Eugene R. Wittkopf dan James M. McCormick ed., (New York: Rowman and Littlefield Publisher Inc., 2004), hlm. 358.

dilakukan kini oleh kelompok-kelompok Islam militan, seperti aksi protes dan demonstrasi damai, dan partai-partai Islam ikut bertanding dalam pemilihan umum. Kalangan Islam militan juga melakukan kerja-kerja amal sosial dan kultural.<sup>25</sup> Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa doktrin *preemptif* tidak terlepas dari karakter individual Bush.

Demikian juga halnya dengan doktrin yang akan dikeluarkan Obama yang telah diprediksi oleh banyak pengamat. Walaupun prediksi itu belum tentu benar, namun berbagai pendekatan ideosinkretik Obama dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk menganalisa model doktrin yang akan diumumkan Obama.

Dalam faktor ideosinkretiknya, Obama dikenal sebagai pribadi yang bersahabat, humoris dan menghargai perbedaan. Meskipun demikian, Obama adalah orang yang dikenal sangat gigih, ulet, tekun dan pintar dalam strategi. Obama yang merupakan keturunan kulit hitam, sangat menghargai keberadaan dan keberagaman dalam bingkai multiras dan multietnik di Amerika. Selain itu, dalam konteks agama, keluarganya tidak seratus persen pemeluk agama Kristen. Terdapat beberapa leluhur terdapatnya yang memeluk agama Islam. Bagi Obama, agama bukanlah suatu hal yang harus dipaksakan, dan agama adalah sumber harapan.<sup>26</sup>

Dengan penjelasan singkat mengenai faktor ideosinkretik Obama tersebut, mampu memunculkan banyak harapan dari sebagian besar warga Amerika dan kalangan internasional yang tidak menyukai tindakan agresif yang dilakukan Bush. Setidaknya dari faktor ideosinkretik Obama tersebut terdapat peluang dan harapan berlakunya doktrin dan administrasi keamanan yang lebih manusiawi di lingkungan internasional.

Terlepas dari perbedaan faktor ideosinkretik diantara dua presiden itu, namun sebagai insan Amerika, mereka memiliki persamaan. Mereka yang terlahir sebagai orang Amerika tentunya mewarisi karakter kenegaraan yang relatif sama. Nilai-nilai yang dianut, serta falsafah dan pandangan hidup yang mereka miliki dan jalankan terhadap negaranya tentunya relatif sama. Bush dan Obama adalah sama-sama pemimpin yang menganut pragmatisme dan adalah orang-orang yang berkepribadian tangguh dan gigih. Meskipun temperamental seorang individu akan memberikan pengaruh terhadap doktrin yang mereka keluarkan, namun dalam pandangan sebagai orang Amerika yang memiliki kesamaan prinsip dan pandangan hidup bernegara,

---

<sup>25</sup> Sahrasad, "USA, Huntington dan Indonesia".

<sup>26</sup> Lisa Rogak, *Obama in His Own Words*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 22.

doktrin yang dikeluarkan oleh kedua presiden ini dalam kapasitas untuk menjaga kepentingan nasional Amerika, tentunya tidak akan mengalami perbedaan yang begitu signifikan.<sup>27</sup>

Walau siapapun presiden yang memimpin Amerika, namun politik luar negeri Amerika terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan nasionalnya sudah dapat digambar dan diperkirakan. Setidaknya terdapat beberapa persamaan esensi antara doktrin *preemptif*, dengan kemungkinan doktrin yang akan diumumkan Obama.

Pertama, meskipun nantinya barangkali akan terdapat perbedaan redaksional – dimana doktrin Obama diramalkan akan lebih mengedepankan aspek-aspek diplomatis, namun yang pasti doktrin kedua presiden itu sama-sama tetap akan mengedepankan dan menjaga kepentingan keamanan Amerika. Dalam kedua doktrin tersebut akan terdapat seperangkat strategi untuk tetap mempromosikan hegemoni pertahanan dan keamanan Amerika dalam percaturan global.

Kedua, doktrin kedua presiden itu sama-sama mengedepankan *public order* sebagai bagian yang paling penting dalam pembuatan kebijakan di Amerika sebagai negara yang demokratis. Dalam *public order* ini terdapat beberapa prioritas yang pastinya akan selalu ditempuh oleh presiden Amerika, siapapun orangnya. Masyarakat Amerika memiliki kepentingan untuk merasa aman dari tindakan agresor yang dapat mengancam keselamatan mereka, oleh karenanya pemimpin Amerika sudah barang tentu akan mengambil kebijakan untuk melindungi kehidupan dan kekayaan masyarakatnya. Presiden Amerika akan mengambil kebijakan untuk menjaga masyarakatnya dari serangan eksternal dan tindakan-tindakan subversif. Kemudian poin berikutnya, setiap presiden Amerika tentunya akan melakukan tindakan pembalasan terhadap pihak-pihak yang telah merugikan kepentingan publik Amerika.

Ketiga, persamaan yang dapat diidentifikasi dari kedua doktrin presiden tersebut adalah kalkulasi biaya dan keuntungan yang diperoleh Amerika dari doktrin yang diberlakukan. Setiap kebijakan yang ditempuh akan berkonsekuensi terhadap pengeluaran biaya, dan dari biaya tersebut harus dapat dikalkulasikan keuntungan dan kerugian dari kebijakan yang diterapkan. Jika keuntungan akibat doktrin itu lebih besar, maka tidak ada alasan untuk menghapus doktrin itu. Sebaliknya, jika kerugian yang ditimbulkan lebih besar, maka tak ada alasan pula untuk tetap mempertahankan

---

<sup>27</sup> Clive Crook, "In Search of an Obama Doctrine", diperoleh dari [www.ft.com/clivecrook](http://www.ft.com/clivecrook) ; Internet, diakses tanggal 1 April 2010.

doktrin itu. Keuntungan dan kerugian yang dimaksud di sini tidak hanya berlaku dalam konteks nominal saja, namun juga yang berhubungan dengan aspek-aspek abstrak seperti *imej* ataupun pencitraan, hegemoni, dan lain sebagainya.

Jelasnya hal yang dapat dianalisa maupun ditelaah dari persamaan kedua doktrin presiden tersebut adalah dalam tataran perspektif internasional dan prespektif nasional. Perspektif internasional berhubungan upaya menjaga eksistensi hegemoni Amerika dalam pergaulan dunia internasional. Mulai dari hegemoni bidang militer dan pertahanan, ekonomi, ideologi, dan politik. Perspektif nasional berkenaan dengan poin-poin terpenting dalam kepentingan nasional Amerika (4 P) seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

## **F. KESIMPULAN**

Sebelum Obama mengumumkan secara resmi doktrin keamanan negara dan sikapnya terhadap Doktrin Bush, analisa mengenai persamaan dan atau perbedaan dari kedua doktrin tersebut dapat dilakukan melalui telaah wacana-wacana yang mengindikasikan gambaran tentang doktrin yang akan diumumkan. Selain itu terdapat pula faktor ideosinkretik yang dapat memberikan gambaran mengenai perkiraan kebijakan yang akan ditempuh. Perbedaan karakter individu biasanya cenderung memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan wacana yang bergulir sekitar Gedung Putih dan Pentagon, dapat diindikasikan sebuah telaah bahwasanya doktrin Obama akan muncul dengan penampilan dan redaksional yang lebih *soft* ketimbang doktrin Bush. Meskipun dengan esensi yang kurang lebih sama, namun "kemasannya" agak sedikit berbeda. Kalau Bush dengan tegas mengumandangkan genderang perang melalui doktrinnya, sebaliknya doktrin Obama diprediksikan lebih menggunakan bahasa-bahasa diplomasi, walaupun pada akhirnya maknanya adalah tetap sama untuk menjaga kepentingan keamanan Amerika.

Akan tetapi secara esensial, doktrin keamanan yang akan dikeluarkan Obama tidak akan jauh berbeda dengan doktrin Bush. Alasannya adalah karena doktrin keamanan menyangkut hal-hal yang krusial dan substantif bagi eksistensi kemandirian Amerika. Adalah tindakan yang lazim jika seorang presiden dengan segala macam cara berupaya untuk melindungi warga negaranya dari ancaman-ancaman yang dapat mengganggu kestabilan keamanan. Bagaimanapun juga peristiwa 11 September akan tetap melekat dan menjadi catatan suram dalam perjalanan sejarah keamanan

Amerika. Oleh karena itu adalah wajar saja jika selaku presiden, Bush dan Obama melakukan tindakan untuk menjaga keamanan negaranya.

Selain itu, walaupun terdapat perbedaan ideosinkretik, namun Bush dan Obama adalah tetap sama-sama orang Amerika. Orang Amerika yang terlahir dengan karakter, pandangan hidup, nilai, dan falsafah kenegaraan yang sama. Mereka sama-sama pragmatis, gigih, dan cinta terhadap negaranya. Persamaan pandangan hidup dan nilai inilah yang secara otomatis akan mengarahkan mereka menempuh kebijakan yang tidak jauh berbeda terhadap persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi oleh bangsa Amerika, terlebih lagi masalah keamanan dan kepentingan nasional.

Hal yang tidak dapat ditawar dalam menganalisa persamaan antara doktrin Bush dan doktrin yang akan diumumkan Obama adalah prinsip-prinsip mendasar yang ada dalam keberlangsungan negara Amerika baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, Amerika masih tetap harus menjaga dan melestarikan status hegemoni yang dimilikinya agar tidak direbut oleh negara lain yang juga semakin mengalami perkembangan kemajuan. Secara eksternal, hegemoni yang dimiliki Amerika akan sangat mendukung pengamanan kepentingan nasional Amerika. Dan satu hal lagi, kebijakan luar negeri yang ditempuh Amerika dalam konteks Amerika dan Dunia dilakukan untuk tujuan mengejar, memperoleh dan mempertahankan kepentingan nasional Amerika termasuk dalam segi keamanan. Karena walau bagaimanapun keamanan amat diperlukan agar kepentingan nasional dari sisi yang lain dapat tetap terjaga dengan baik.

## Daftar Referensi

- Althaf, "Akankah Obama Mengubah Doktrin Perang Bush? Diperoleh dari <http://www.annah.com/index.php/news/read/5884/akankah-obama-mengubah-doktrin-perang-bush>
- Brooks, Stephen G. dan William C. Wohlforth, "Keunggulan Amerika dalam Tinjauan", dalam *Amerika dan Dunia, Memperdebatkan Bentuk Baru dalam Politik Internasional*, Jakarta: Freedom Institute dan Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Bush, George, W., "Pidato Sambutan West Point" dalam *Amerika dan Dunia, Memperdebatkan Bentuk Baru dalam Politik Internasional*, Jakarta: Freedom Institute dan Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Byers, Michael, "Terrorism: The Use of Force and International Law After 11 September", dalam *International Relations Journal*, Vol. 6. No. 2, New York: Prentice Hall Inc.
- Cheng, Tai-Heng, dan Edward, Valaitis, "Shaping an Obama Doctrine of Preemptive Force" *Temple Law Review*, Fall, 2009.
- Crook, Clive, "In Search of an Obama Doctrine", diperoleh dari [www.ft.com/clivecrook](http://www.ft.com/clivecrook)
- Darjaman, Denny, "Patung Obama dan Sebuah Harapan" diperoleh dari <http://darjaman.wordpress.com/2010/01/04/patung-barack-husein-obama-dan-sebuah-harapan/>
- Greenstein, Fred, I., "The Changing Leadership of George W. Bush", dalam *The Domestic Source of American Foreign Policy*, Eugene R. Wittkopf dan James M. McCormick ed., New York: Rowman and Littlefield Publisher Inc., 2004.
- Griffiths, Martin dan Terry, O'Callaghan, *International Relations: The Key Concepts*, London: Routledge, 2002.
- Ikenberry, John, G., "America's Imperial Ambitions" dalam *American Foreign Policy Theoretical Essay*, Edisi ke-4, New York: W.W. Norton dan Company, Inc., 2007.
- , *American Foreign Policy Theoretical Essay*, Edisi ke-4, New York: W.W. Norton dan Company, Inc., 2007.
- Loo, Dennis, "Obama and the Fairness Doctrine", *New York Times*, 19 Februari 2009.
- Nye, Joseph, S., Jr. "Beyond September 11", dalam *The Domestic Source of American Foreign Policy*, Eugene R. Wittkopf dan James M. McCormick ed., New York: Rowman and Littlefield Publisher Inc., 2004.
- Plano, Jack, C., dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional*, Jakarta: Putra A. Bardin, 1999.

Redaksi, “Departemen Perdagangan AS Kini Sedang Meninjau Ulang Doktrin *Preemptive Military Strikes*”, diperoleh dari [www.suaramedia.com](http://www.suaramedia.com)

Rogak, Lisa, *Obama in His Own Words*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Sahasrad, Herdi, “USA, Huntington dan Indonesia”, *Tempo*, 20 November 2006.

Walt, Stephen M., “Beyond Bin Laden: Reshaping U.S. Foreign Policy” dalam *America and the World, Debating the New Shape of International Politics*, New York: Council and Foreign Relations Inc., 2002.